BAB IV

PERAN MUHAMMAD NATSIR DALAM PEMBERONTAKAN PRRI DI PADANG

A. Latar belakang Pemberontakan PRRI

Lahirya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di padang oleh sebagian orang dianggap sebagai akumulasi dari kekecewaan rakyat di Sumatera terhadap pemerintah saja. Tetapi untuk mengetahui kenapa PRRI memberontak kepada pemerintah pusat kita harus mengetahui terlebih dahulu kondisi politik yang ada di Indonesia serta elemen-elemen masyarakat apa saja yang terlibat dalam pemberontakan itu. Menurut penulis setidaknya ada dua elemen yang terlibat dalam pemberontakan itu yang pertama adalah Meliter dan Sipil yang memiliki permasalahan yang berbeda antara mereka dengan Pemerintah Pusat.

Kekecewaan yang paling utama adalah karena sentralisasi kekuasaan yang memunculkan kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, pembangunan di daerah terutama di Sumatera Tengah tidak berjalan dengan baik setelah sepuluh tahun Indonesia merdeka. Sebagai contoh M. Yamin menyebutkan salah satu keadaan di mana jalan raya di Sumatera Tengah banyak yang berlobang dan rusak berat, sedangkan di pulau Jawa jalan raya sudah baik keadaannya. Akibat yang ditimbulkan oleh prasarana jalan raya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak baik adalah membuat perekonomian masyarakat tidak berkembang dengan baik.[1]

Dari catatan yang di tulis oleh S. Takdir Alihjahbana pada tahun 1956, bahwa dari keseluruhan ekspor Indonesia, kira-kira 71% berasal dari pulau sumatera, dengan pembagian 21% dari Sumatera Utara, 15% dari Sumatera Tengah dan 35% dari Sumatera Selatan. sedangkan pulau jawa hanya menekspor 17% sedangkan 12% dari pulau lainnya. Angka ini menunjukkan bahwa Sumetera merupakan daerah pengekspor paling besar pada saat itu. Tetapi dalam pengunaan dana sangat minim untuk pembangunan daerah Sumatera. Sumatera yang menghasilkan 71% deviden hanya memakai 17% sedangkan Pulau Jawa yang hanya menghasilkan 17% memakai dana untuk pembangunan sebanyak 75%.[2]

Permasalhan kedua adalah pada kondisi politik di Indonesia yang menerapkan sistem Parlementer. Ketika Indonesia menerapkan sistem Presidensil, Soekarno sebagai Presiden mempunyai kendali yang cukup kuat tetapi ketika Indonesia menerapkan sistem Parlementer Presiden hanya menjadi boneka politisi lainnya. PKI sangat jeli melihat kondisi yang dialami Soekarno, PKI yang dulunya menyebut Soekarno sebagai diktator beralih menjadi pendukung Soekarno yang sangat lantang menyuarakan slogan-slogan “ hidup Bung Karno”. Pada saat Soekarno menawarkan konsep Demokrasi Terpimpin PKI tampil sebagia pendukung utama, mereka memuji Soekarno dengan

[1] M. Yamin, *Dewan Banteng Contra Neo Ningrat*. (Jakarta: LPPM Tan Malaka,2009) , 18.
[2] S. Takdir Alihjahbana, *Perjuangan Untuk Autonomi dan Kedudukan Adat Didalamnja*(Jakarta: Pustaka Rakyat, 1957), 16-17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatakan sebagai penemuan yang orisinil dari pemimpin Revolusi.[3] Sikap yang berbeda di tunjukkan oleh Partai Masyumi dan daerah di luar Jawa dengan menentang konsep Presiden tersebut.

Permasalahan ketiga adalah permasalahan di tubuh tentara. Konflik internal tentara sebenarnya di mulai sejak akhir masa Revolusi dan kemudian mencuat kembali pada tahun 1950an, dan menjadi fenomena lain yang mewarnai kehidupan politik pra-PRRI. Kebijakan rasionalisai dan reorganisasi yang lebih dikenal dengan sebutan RARE, telah menjerumuskan tentara dalam krisis terparah pasca kemerdekaan. Kebijakan ini bertujuan untuk membuat Angkatan Darat lebih efisien dan profesional. Namun pada kenyataannya telah membawa luka terhadap beberapa tokoh yang pada masa Revolusi telah memberi peran yang sangat penting dalam menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Luka itu terlihat jelas dalam peristiwa 17 Oktober 1952. Dalam peristiwa itu terjadi demonstrasi di Jakarta yang terdiri atas massa dengan jumlah 10.000 orang yang di curigai di dalangi oleh Syahrir untuk kepentingan politknya.

B. Proklamasi PRRI dan Perjuangannya

Lahirnya Dewan Banteng menjadi permulaan bagi terbentuknya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Dewan Banteng ada sebagai bentuk kekecewaan umum, mulai dari persoalan lokal, ketidakpuasan di kalangan Perwira sampai pada kemacetan politik pasca-revolusi, faktor

[3] Syamdani, *PRRI Pemberontakan atau Bukan?* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2008), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Soekarno dan agitasi Komunis, di samping ketidak sabaran lokal untuk mengambil inisiatif sendiri.

Seperti yang sudah kita bicarakan di atas kebijakan RARE telah membawa banyak efek negatif terhadap di tubuh tentara, pada saat jumlah tentara di kurangi, para perwira merasa terhina ketika pasukan mereka di porakporandakan oleh kebijakan pemerintah pusat.

Pada tahun 1950an daerah Sumatera di ciutkan menjadi dua komanda Tentara Totarium (TT) Sumatera Tengah/Barat di hilangkan yang secara otomatis menghilangkan Devisi Banteng tampa mendapat santunan sedikitpun dari pemerintah. Para eks perwira Devisi Banteng ini melakukan reuni yang tujuan awalnya untuk menyelamatkan hidup mereka, mula-mula mengumpulkan para eks perwira Devisi Banteng yang di prakarsai oleh perwira yang masih berdinas seperti Jusuf Nur dan Kapten Djamur Djamin (keduanya perwira Akademi Hukum Meliter) pengumpulan ini ternyata mendapat sambutan dari teman-teman di Sumatera Tengah. Kelanjutan pembentukan Panitia Reuni di Jakarta dan Padang, kemudian di daerah-daerah lain seperti di Aceh, Palembang dan Medan. Pertemuan pertama berlangsung di Jakarta pada 21 September 1956 yang di hadiri oleh sekitar 123 anggota termasuk Letkol Ahmad Husein. Panitia Reuni tersebut mengundang KSAD Nasution dan ia juga menjadi pelindung pada acara tersebut bahkan Markas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Besar Angkatan Darat memberi fasilitas bagi tentara yang berada di luar Sumatera dengan memberikan surat dinas.[4]

Pada Reuni tersebut menghasilkan beberapa poin pertama perbaikan yang progresif dan radikal terhadap pimpinan negara. Kedua penyelesaian perpecahan di dalam angkatan darat. Ketiga pemberian otonomi seluas-luasnya terhadap Sumatera Tengah dan yang terakhir menghapuskan sentralistik kekuasan yang menyebabkan Stagnansi dan korupsi dalam pembangunan.[5]

Pertemuan Dewan Banteng tidak berhenti sampai disitu saja, karena sesuai dengan dokumen keputusan akan di laksanakan Reuni jilid II untuk menindaklanjuti keputusan-keputusan yang di buat sebelumnya. Dalam meninjak lanjuti keputusan ini, semangat kepemimpinan lokal dipegang kembali dengan mengajak keikutsertaan "tali tigo sapilin" : alim ulama', kaum adat dan cerdik pandai, termasuk unsur pejabat di mintai nasihat, sehingga menghasilkan 17 orang aggota Dewan Banteng

No	Nama	Kedudukan	Keterangan
1	Letkol.Ahmad Husein	Ketua	Komandann Resimen Infantri 4
2	Mayor (Purn) Soelaiman	Sekjen	Kepala Biro Rekonstruksi Nasional

[4] Mestika Zed, *Sumatera Barat di Panggung Sejarah 1945-1995* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), 137.
[5] Ibid., 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			Sumatera Tengah
3	Kaharuddin Dt. Rky. Basa	Angota	Kepala Polisi Sumatera Tengah
4	Soetan Soeis	Anggota	Kepala Polisi Kota Padang
5	Mayor Anwar Umar	Anggota	Komandan Batalion Resimen 142, Inf.4
6	Kapt. Nurmathias	Anggota	Komandan Batalion Resimen 140, Inf.4
7	H. Darwis Taram Dt. Tumanggung	Anggota	Bupati 50 kota
8	Ali Luis	Anggota	Bupati d/p Gubernur Sumatera Tengah
9	Syekh Ibrahim Musa Parabek	Anggota	Ulama’
10	Dt. Simaradjo	Anggota	Ketua Adat / MTKAAM
11	Kol. Ismail Lengah	Anggota	-
12	Letkol. Hasan Basri	Anggota	-
13	Saidina ALI	Anggota	Kepala Jawatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			Sosial Kab. Kampar, Riau
14	Let. Sebastian	Anggota	Perwira Distrik Meliter 20, Indragiri, Riau
15	Abdoel Manaf	Anggota	Bupati Merangin, Jambi
16	Kapt. Jusuf Nur	Anggota	Akademi Hukum Meliter Jakarta
17	Mayor Sjoeib	Anggota	Wakil Asisten II, Staf Umum AD, Jakarta[6]

Rumusan-rumusan Program Dewan Banteng akhirnya di tuangkan dalam sebuah Dokumen berjudul Dasar-dasar Pokok Perjuangan Dewan Banteng yang berisi di antaranya pengembalian "Dwitunggal" Soekarno-Hatta; pembenahan kepemimpinan Angkatan Darat, pembentukan Senat; alat-alat Pemerintah Pusat; dan Administrasi Kenegaraan dan yang tidak kalah penting adalah peringatan akan bangkitnya PKI.

Untuk menjalankan program yang di terapkan, Dewan Banteng sering melakukan rapat-rapat apalagi setelah Sumatera Tengah kehilangan Dewan Perwakilannya (DPRST) akibatnya partai di daerah kehilangan wadah,

[6] Leirissa R.Z, *PRRI*, 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembangunan tidak berjalan. Rencan pembangunan yang di lakukan oleh Pemerintah pusat di anggap tidak memadai, kemudian Dewan Banteng mengambil inisiatif sendiri dengan membuat program dan di tawarkan kepada rakyat dalam rapat terbuka ternyata mendapat respon yang positif dari masyarakat. Setiap hari muncul pernyataan-pernyataan yang mendukung Dewan Banteng, tetapi ketika meminta persetujuan kepada Pemerintah Pusat tidak pernah mendapat tanggapan.

Dialog dengan pusat mengalami jalan buntu satu-satunya langkah yang dilakukan adalah mengambil alih jabatan Kepala Daerah yang di pegang oleh Gubernur Ruslan. Dengan di dukung oleh politisi dan masyarakat maka pada hari jum'at tanggal 21 September 1956 naskah serah terima di tanda tangani. Melihat kejadian ini PNI dan PKI menganggap sebagai sebuah kudeta tetapi kemudian di jelaskan oleh Letkol. Ahmad Husein sebagai langkah untuk melakukan pembangunan demi kepentingan bersama.

Pembangunan kemudian di lakukan oleh Dewan Banteng. Iragasi di perbaiki, Masjid-masjid di bangun begitu juga dengan Gedung Sekolah. Dalam beberapa bulan saja Sumatera Tengah menjadi yang terbaik dalam gerakan pembangunan dibandingkan daerah lain. Dewan Banteng memilik sumber dana yang cukup besar dengan melakukan perdangangan ke Singapura, hasil dari perdagangan tersebut tidak lagi di setorkan kepada Pusat tetapi untuk membangun Sumatera Tengah. Keberhasilan Dewan Banteng membuat daerah lain melakukan hal yang sama seperti yang terjadi di Medan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendirikan Dewan Gajah, dan juga di terbentuknya Dewan Garuda di Sumatera Selatan.

Menjelang tahun 1956 keadaan politik Indonesia senakin kacau, rakyat di luar Jawa merasa kecewa dengan pemerintah Pusat, lebih-lebih Soekarno lebih condong ke kiri di tambah mundurnya Wakil Presiden M Hatta membuat Dewan yang ada di Sumatera Dewan Banteng, Dewan Gajah dan Dewan Garuda bergerak untuk menentang Pusat.

Tanggal 8 September 1957, tokoh-tokoh pembangkan di Sumatera ditambah dengan Permesta di timur melakukan di palembang untuk mengkordinasi perjuangan daerah terhadap pemerintah pusat di bawah satu Dewan yang bernama Dewan Perjuangan yang di ketuai oleh Ahmad Husein. Sesuai dengan yang di sepakati oleh Dewan Perjuangan mereka akan melakukan pertemuan lagi di Padang pada pertengahan Desember 1957. Ahmad Husein lalu mengirim kawat kepada Panglima Sumual di Manado dan Panglima Berlian di Palembang agar datang bersama stafnya di Padang sebagai persiapan terakhir. Berlian ternyta tidak bisa datang dan hanya mengutus stafnya, sedangkan Sumual datang bersama Sumitro melalui Singapura karena jalur laut dan udara telah di kuasi oleh pusat.

Pertemuan ini di anggap tidak lengkap dan di butuhkan pertemuan kembali. Tempatnya berada di Sungai Dareh, dekat perbatasan antara Sumatera Barat dan Jambi sekitar minggu terakhir pada bulan Desember 1957. Tempat ini dipilih kerena beberapa alasan. Pertama agar Berlian lebih mudah dari Palembang, hal ini di lakukan untuk menjaga aset berupa minyak di Palembang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

supaya di kuasai oleh Dewan Perjuangan. Karena Dewan perjuangan khawtir Berlian akan membelot meskipun akhirnya menjadi kenyataan. Alasan kedua untuk menghindari serbuan Pusat karena mereka telah memerintahkan tentara untuk menangkap pimpinan Dewan Perjuangan.

Pertemuan di Sungai Daereh di hadiri oleh Ahmad Husein (Ketua Dewan Perjuangan), dan Dahlan Djambek (Sekjen), kemudian juga hadir beberapa Tokoh seperti: H.N Sumual, M. simbolon, Berlian, Zulkifli Lubis, Sjoieb, Anwar Umar, Muhammad Natsir, Sjafruddin Prawiranegara, Burhanuddin Harahap, Soemitro Djojohadikusumo, W.P Nainggolan, Mayor Nawawi (Staf Berlian), S.P Hutabarat, A.N Nusjirwan, dan Amelz.

Pertemuan ini meskipun tidak banyak di hadiri oleh tokoh sipil tetapi banyak menghasilkan keputusan yang menentukan langkah PRRI selanjutnya seperti tentang pembagian tugas, susunan Kabinet serta pencarian sejata yang akhirnya berlanjut dengan ultimatum 10 Februari 1958 itu.

Diproklamirkannya PRRI oleh Ahmad Husein di Padang pada 15 Februari 1958 mendapat dukungan dari Perjuangan Semesta (PERMESTA) di Sulawesi. Tidak hanya itu sejumlah tokoh nasional baik sipil maupun militer juga memberikan dukungan dan ikut bergabung dengan PRRI di Sumatera Barat, antara lain M. Natsir, Syafruddin Prawiranegara, Burhanuddin Harahap, M. Syafe'i, Kolonel Dahlan Djambek, Kolonel Mauludin Simbolon dan Letnan Kolonel Ahmad Husein itu sendiri. [7]

[7] Audrey Kahin, *Dari Pemberontakan ke Integrasi Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), 328.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemberontakan dimulai ketika pada tanggal 10 Februari oleh Dewan Perjuangan di Padang menyampaikan ultimatum kepada pemerintah pusat dengan tuntutan antara lain sebagai berikut:

1. Menuntut agar Kabinet Djuanda dibubarkan dan mengembalikan mandatnya kepada Presiden.
2. Hatta dan Hamengkubuwono IX ditunjuk untuk membentuk Kabinet baru.
3. Supaya Kabinet baru memiliki kesempatan sepenuhya untuk bekerja sampai diadakan pemilu berikutnya.
4. Agar Presiden Soekarno dan para Pejabat membatasi diri menurut Konstitusi.
5. Apabila tuntutan diatas tidak dipenuhi maka kami akan mengambil langkah kebijaksanaan sendiri. [8]

Hari berikutnya setelah melaui sidang darurat, Kabinet Djuanda mengambil keputusan : Menolak keras ultimatum Padang dan bahkan memerintahkan KSAD memevat langsung dan menangkap para Kolonel yang berada dibelakang Dewan tersebut. (Achmad Husein, Zulkifli Lubies, dkk), pada hari berikutnya Kabinet menyiarkan penolakannya lewat Radio dan perintah-perintah selanjutnya. Komando Daerah Militer Sumatera dibekukan dan hubungan darat maupun udara dengan Sumatera tengah dihentikan, seperti yang telah dilakukan terhadap Sulawesi Utara.

Ketika ultimatun ditolak dengan keras, maka pada hari ke 5 setelah ultimatum itu dikeluarkan. Dewan perjuangan nampaknya telah siap untuk

[8] [8] Akma Jacob, *Wawancara* (Bukit Tinggi 06-08-2015) .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengambil tindakan akhir. Tepat pada tanggal 15 februari 1958. Dewan mengumumkan proklamasi pemerintahan tandingan dengan apa yang mereka namakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia(PRRI). Dewan perjuangan sejak saat itu menganggap diri mereka terlepas dari kewajiban untuk mentaati Presiden Soekarno sebagai Kepala Negara dan membentuk sebuah Kabinet PRRI. [9] Dengan susunan Kabinetnya sebagai berikut:

Nama	**Jabatan**
Mr. Sjaruddin Prawiranegara	Perdana Menteri/ Menteri Keuangan
Mauludin Simbolon	Menteri Luar Negeri
Kol Dahlan Djambek	Menteri Dalam Negeri
Mr. Burhanuddin Harahap	Menteri Pertahanan / Merangkap Menteri Kehakiman
Dr. Sumitro Djojohadikusumo	Menteri Perhubungan dan Pelayaran
Engku Moh. Sjafei	Menteri PP & K / Merangkap Menteri Kesehatan
J.F Warouw	Menteri Pembangunan
S. Sarumpaet	Menteri Pertanian dan Perburuan
Mochtar Lintang	Menteri Agama
M. Saleh Lahade	Menteri Penerangan
A. Gani Usman	Menteri Sosial

[9] Leirissa R.Z, *PRRI*, 211.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saat PRRI mnegumkan proklamasi pada tanggal 15 februari 1958, Presiden Soekarno sedang berada di luar Negeri dan pulang dari perjalanannya ke Jepang pada bulan yang sama yaitu Februari. Pada mulanya dia menahan diri untuk tidak memikirkan tanggapan terbuka terhadap proklamasi PRRI di Padang. Karena masih memerlukan konsultasi dengan Muhammad Hatta yang pada saat itu sudah tidak menjadi Wakil Presiden. Hatta yang sangat terkejut dan tidak setuju dengan tindakan terhadap Padang, tetapi dia mentah-mentah menolak menyalahkan Persemesta. Meskipun pada Minggu pertama setelah Proklamasi PRRI ada satu dua kali pertemuan antara kedua tokoh itu, dan Soekarno semakin digiring untuk mengambil tindakan terhadap PRRI.

Hatta masih menaruh harapan bahwa disaat-saat seperti itu, masih ada jalan untuk mencegah pecahnya perang yang diutuskan seseorang ke Padang tetapi dicegat oleh pihak-pihak yang tidak mengiringi jalan damai. Dalam pertentangan dengan Soekarno pada tanggal 3 Maret, masih ada harapan untuk titik temu dengan Presiden. Mereka kembali menjadwalkan pertemuan pada tanggal 7 Maret, tetapi Presiden Soekarno tiba-tiba Presiden Soekarno membatalkannya dengan alasan akan berbicara dengan pemimpin partai.

Beberapa penasehat Soekarno, kemudian membocorkan akan kompromi Soekarno dan Koran Pemuda yang menyebutkan Hatta sebagai pengkhianat. Kemudian Hatta langsung membalas terhadap Soekarno “ pembicraan tak dapat diteruskan lagi”. Sejak saat itu ketegangan dan perang diantara keduanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semakin terperosok. “perang saudara” hingga akhirnya benar-benar perang berlarut hingga 5 Oktober 1961.

Ketika posisi Hatta semakin terjepit akibat penjegalan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh PKI, sedangkan Soekarno berada di bawah tekanan para penasehatnya yang berhaluan Komunis. Akhirnya tidak ada jalan lain untuk berkompromi. Tentu saja Soekarno dan PKI tidak sendirian jika mereka memutuskan untuk memilih tindakan meliter terhadap Proklamasi PRRI. Perdana Menteri dan KSAD Nasution tidak mau lagi untuk kompromi dengan PRRI, keadaan seperti ini hanya tinggal menunggu waktu untuk terjadinya perang.

Sehari setelah Proklamasi PRRI Kabinet Djuanda di dampingi KSAD Nasution memerintahkan untuk menangkap semua tokoh yang terlibat dalam PRRI baik Meliter maupun sipil. Mereka juga meminta para tokoh Permesta untuk menyerahkan diri dan mengatakan loyal terhadap Jakarta, tetapi permintaan ini di tolak oleh tokoh Permesta. Nasution langsung menanggapi penolakan tersebut dengan mengirimkan pesawat AURI untuk membombardir kota Padang dan Bukit Tinggi.

Meskipun kota Padang dan Bukit Tinggi di hujani bom dukungan rakyat terhadap PRRI tidak surut. Untuk memastikan dukungan rakyat pada 20 February 1958 Ahmad Husein mengadakan rapat terbuka di Padang. Di depan ribuan hadirin ia berpidato lantang sambil melepaskan tanda pangkatnya dan melemparkannya ke tanah sambil berkata apabila rakyat tidak mempercayainya, mereka dapat menangkapnya saat itu juga dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyerahkannya ke pusat. Beberapa orang pemuda memungut tanda pangkatnya dan menyerahkannya kembali kepada Ahmad Husein.

Berbanding terbalik dengan PRRI, Pemerintah Pusat hanya mendapat dukungan dari PNI dan PKI sedangkan PRRI mendapat dukungan dari masyarakat luas bahkan Mahasiswa yang ada di luar Sumatera berbondong-bondong pergi ke Sumatera untuk mendukung PRRI. Selain itu sejumlah tentara di Bandung yang berasal dari Sumatera bergabung dengan PRRI.

Di Jakarta Nasution sudah menyiapkan serangan selanjutnya dengan mengangkat Brigadir Jend. Djatikusumo untuk mengambil alih Sumatera dari tangan PRRI. Tentara yang di tertjunkan adalah Devisi Diponegoro sebanyak dua Resimen dengan jumlah Dua Belas Ribu tentara.

Tindakan militer. Jam 04.30 pagi tanggal 17 April 1958 Kapal perang mulai melakukan bombardemen kota Padang. Disepanjang pantai Ulak Karang formasi tempur kapal perang pusat siap melakukan satu jam manuver ke Pantai. Jam 06.40 pagi, satu Kompi pasukan RPKAD mendarat di Bandara Tabing, sementara Pasukan Ampibi dari Jawa Tengah dibawah pimpinan Jend. A.Yani yang baru pulang dari pendidikan Militernya di Amerika mendarat di Ulak Karang. Kota Padang jatuh ke tangan pusat dan pada Tanggal 6 Mei Bukittinggi juga dikuasai APRI.

Setelah operasi militer terhadap kaum pemberontak dimulai, Soekarno yang tidak membuat apa-apa untuk membantu menyelesaikan krisis itu, sekarang mengambil sikap keras terhadap PRRI dan Persemesta dengan dukungan yang lantang dari PKI. Sejak semula tampak dari kedua belah pihak,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik KSAD maupun PRRI tidak sungguh-sungguh untuk membinasakan lawan-lawan mereka. Demikianlah ketika pasukan PRRI mengosongkan posisi-posisi mereka setelah memberikan perlawanan yang tidak berarti, karena tidak sesampai hati membunuh warga sesama Indonesia. Walaupun sebelumnya mereka menerima cukup banyak senjata dari luar negeri, mereka benar-benar tidak menduga bahwa merekan akan benar-benar akan bertempur, perhitungan mereka adalah mereka yakin bahwa mereka akan "mencekik leher" pemerintah ekonomi pusat dengan jalan mencegah masuknya komiditi ekspor yang sebagian besar kebutuhan Jawa berasal dari luar Jawa.

Setelah Prsiden Soekarno mengambil sikap keras dan golongan kiri mengambil sikap agitasi mereka, baik melalui aksi-aksi sabotase maupun intimidasi lewat media massa terhadap kedudukan PRRI, maka kaum pembela PRRI di Sumatera memberikan perlawanan yang lebih bersungguh-sungguh dalam apa yang kemudian berkembang menjadi perang gerilya dari hutan ke hutan.

Pasukan seperti itulah yang dihadapi Yoga Sugama dengan kekuatan sekitar 6000 pasukan menggunakan rumah Achmad Husain di Bukittinggi sebagai posnya. Dengan berbekal informasi intilijen, dia masuk ke Sumatera Barat pada awal tahun 1959. Setelah Bukittinggi jatuh ke tangan Tentara pusat peringatan yang diterimanya sehubungan dengan tugas yang akan dilaksanakan ialah, bahwa kekuatan PRRI dan dukungan rakyat berhadapan bagaikan "ikan dan air" karena itu dia berusaha menyiapkan suatu operasi yang dinamakan dengan "Operasi Penggalangan Citra Baik" sasarannya ialah melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendekatan sosial dengan masyarakata sambil membersihkan devisi citra di Ponegero yang oleh daerah lain diketahui daerah komunisnya. Lagi pula penduduk Desa yang dikenal dengan ketat agamanya sangat mencurigai setiap gerak-gerik musuh yang diidentifikasi oleh PKI yang dipropaganda PRRI. Selama masa tugasnya di Bukittinggi ia telah mengerahkan 8 kali operasi besar-besaran. Dalam arti serangan secara serentak dengan mengerahkan dua atau lebih batalyon dan 25 kali operasi kecil. Dengan pasukan sebnayak batalyon atau kurang hanya sekitar 5 orang yang tewas, 5 orang luka berat dan ringan.

Kekuatan PRRI lama-lama bisa dipatahkan, pada April 1961 Kawilarang menyerah dan bulan berikutnya Achmad Husein menyerah secara resmi pada tanggal 29 Mei 1961 disaksikan oleh sekiar 2.500 anak buahnya, termasuk pendukung sipil dan militer.[10]

Pada tahun kemerdekaan RI yang ke 16 presiden memberikan Amnesti umum kepada semua orang yang telah menyerah menjelang 5 Oktober atau hari ulang tahun TNI 1961. Pada bulan September kembali pulalah Sjafruddin, Burhanuddin dan Natsir. Dahlan Djambek yang yang tidak mau menyerah akhirnya tewas di Bonjol, Pasaman, setelah mendapat serangan gencar dari tentara pusat, dengan demikian berakhirlah PRRI.

C. Alasan Natsir Bergabung Dengan PRRI

Keterlibatan Natsir dalam pemberontakan PRRI di Padang pada tahun 1958-1962 tidak di landasi oleh hasrat untuk menggulingkan Republik

[10] Mestika Zed, *Sumatera Barat,* 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia tetapi karena beberapa alasan. Kedekatan Soekarno dengan PKI setelah ia melakukan kunjungan ke negara komunis Uni Soviet dan China telah membuat poros Jakarta-Hanoi-Peking-, yang menyebabkan beberapa reaksi di Indoesia, seperti ketika ulama' dari berbagai daerah melakukan perkumpulan di Palembang Sumatera Selatan dalam acara "Musyawwarah Nasional Alim Ulama' Se-Indonesia" pada 1957 untuk membahas tentang bahaya Komunisme yang menghasilkan Fatwa tentang haramnya paham Komunisme.[11]

Tetapi faktor-faktor keterlibatan Natsir pada pemberontakan PRRI bukan hanya di dorong oleh masalah politik tetapi hal lain yang penulis anggap sebagai pendorong dalam pemberontakan ini.

a. Faktor ideologis

Muhammad Natsir adalah tokoh yang berideologi Islam modernis, ideologi ini tidak serta merta ada dalam diri Natsir tetapi melalui proses panjang. Sejak kecil sampai dewasa Natsir di gembleng dengan nilai-nilai keislaman yang modernis serta praktis. Di dareah Minangkabau tempat kelahiran Natsir sudah sejak lama dikenal sebagai daerah yang memegang teguh nilai-nilai Islam, daerah ini banyak memiliki ulama' yang menganut Islam modernis yang sangat fanatik terhadap agama Islam. Di daerah inilah Natsir lahir dan di daerah ini juga Muhammad Natsir mendapat pelajaran agama dari para ulama' yang berpaham Islam modernis.

[11] Artawijaya, *Belajar dari*, 104-106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengaruh Islam modernis dalam diri Natsir tidak hanya ketika ia kecil saja, ketika remaja Natsir bertemu dengan Ahmad Hassan seorang tokoh Islam radikal yang berpikiran Modernis, bagi Natsir A Hassan adalah sosok yang sangat berpengaruh terhadap kepribadiannya. Natsir tidak memperoleh pendidikan keislaman secara formal, melainkan melalui hubungan langsung dengan tokoh-tokoh pemikir Islam, seperti A. Hasan dan Agus Salim. Dan juga melalui karya- karya tokoh pembaharu di dunia Islam, seperti Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha.

Hasrat, cita-cita dan keinginan yang kuat dari Mohammad Natsir untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara sudah sejak lama ada dalam dirinya seperti saat terjadi perdebatan panjang tentang Dasar Negara antara Natsir dan Soekarno, Natsir berpendapat bahwa Islam adalah Ideologi yang pas untuk di jadikan sebagai Dasar Negara sedangkan Soekarno mengatakan bahwa paham Sekulerlah yang akan membawa kemajuan bagi Indonesia. pemahaman tentang Islam yang berbeda dengan Sukarno, serta sikap anti komunismenya telah menimbulkan konflik diantara keduanya. Oposisinya terhadap Presiden Soekarno di masa “demokrasi terpimpin”, mendorongnya untuk bergabung dengan kaum pembangkang yang pada mulanya digerakkan oleh panglima-panglima militer di daerah. Oposisi ini akhirnya merebak menjadi pergolakan bersenjata, setelah mereka membentuk PRRI.(Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) dit.PRRI adalah pemerintah tandingan terhadap Pemerintah Pusat RI di Jakarta. Alasan pembentukannya antara lain ialah, tokoh-tokoh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PRRIberpendapat bahwa pemerintah RI di bawah pimpinan Perdana Menteri Djuanda adalah pemerintah yang tidak sah karena dibentuk oleh Presiden Soekarno dengan cara-cara yang menyimpang dari aturan-aturan konstitusi yang berlaku. Mereka pun menuduh bahwa pemerintah pusat RI terlalu toleran kepada golongan komunis. memfokuskan pembangunan ekonomi hanya di pulau Jawa dan mengabaikan daerah-daerah lain di Indonesia. PRRI akhirnya dapat dilumpuhkan secara meliter oleh pemerintah pusat, sehingga kekuatan mereka tercerai-berai. PRRI yang berganti nama menjadi Republik PersatuanIndonesia (RPI) akhirnya menghentikan perlawanan, setelah pemerintah pusat mengumumkan amnesti umum kepada mereka yang menyerah.

b. Faktor Politik

Keterlibatan Natsir dalam pemberontakan PRRI di Padang tidak lepas dari perselisihan yang terjadi antara Partai Masyumi dengan Presiden Soekarno. Soekarno beralasan bahwa Persoalan Indonesia yang tidak kunjung selesai di sebabkan karena Indonesia menganut sistem Multipartai, yang membuat munculnya banyak tekanan dari pihak oposisi untuk menggoyang kabinet yang sedang berjalan.

Kabinet Ali II yang diisioleh koalisi PNI-Masyumi-NU pun akhirnya merasakan kesulitan itu dan tidakmampu lagi mengemban mandat sebagai pemenang Pemilu 1955 dan mundur pada 1Maret 1957, kekautan koalisi ini kemudian melemah setelah keputusan MuktamarMasyumi tahun 1956 untuk menarik diri dari Kabinet Ali II.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebelum membahas elemen masyarakat yang terlibat dalam pemberontakan sebaiknya kita melihat kondisi Indonesia pada saat itu. Pada tahun 1950an indonesia berada dalam kondisi yang sangat kacau, selain tidak meratanya pembangunan dan masalah korupsi yang sedang marak terjadi, Indonesia pada waktu itu belum menemukan ideologi atau sistem yang cocok untuk di jadikan ideologi tunggal. Ada tarik menarik ideologi antara golongan Islam, Nasionalis dan Komunis yang berdampak pada perubahan Undang-undang Dasar.

Sejak pertama kalinya Demokrasi Liberal digulirkan pada tanggal 14 November 1945, sampai kemudian mendapatkan penetapan konstitusional melalui UUDS 1950 (Undang-Undang Dasar Sementara) yang menegaskan demokrasi Indonesia berhaluan liberal dengan sistem pemerintahan bersifat parlementer. Bangsa Indonesia belum pernah sekalipun memiliki pemerintahan yang kuat dalam arti bertahan sampai akhir masa kerja periodenya (satu masa kerja kabinet lima tahun), sebut Kabinet Sjahrir I (4 November 1945-12 Maret 1946), Kabinet Sjahrir II (12 Maret -2 Oktober 1946), Kabinet Sjahrir III (2 Oktober 1946-27 Juni 1947), Amir Sjarifoeddin I (3 Juli 1947-23 Januari 1948), Amir Sjarifoeddin II (24 Januari-September 1948), Hatta I (September-22 Desember 1 948), Sjafruddin Prawiranegara (kabinet PDRI 22 Desember 1948-13 Juli 1949), Hatta II (14 Juli-15 Desember 1949), Hatta III (kabinet RIS 20 Desember 1949-8 September 1950), Natsir (9 September 1950-20 Maret 1951), Sukiman (April 1951 -Februari 1952), Wilopo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(April 1952-Juni 1953), Ali Sastroamijoyo (Juli 1953-Juli 1955), Boerhanoeddin Harahap (12 Agustus 1955-3 Maret 1956) yang semua kabinet itu tidak menunjukkan periode yang efektif dalam menjalankan masa tugasnya. [12]

Lebih parahnya lagi kemacetan politik tidak hanya terjadi di parlementer, tetapi juga menjalar di Majelis Konstituante yakni anggotaanggota partai-partai politik yang tergabung dalam Majelis Konstituante tidak mampu mencapai konsensus mengenai dasar negara dan undang-undang dasar. Ada tiga usulan tentang konsep UUD Usul yang pertama Pancasila didukung oleh PNI dengan 116 anggota, PKI termasuk Fraksi Republik Proklamasi 80 anggota, Parkindo 16 anggota, PSI 10 anggota, IPKI 8 anggota dan partai-partai kecil lainnya dengan total berjumlah 273 orang. Usul kedua Islam didukung oleh Partai Masyumi 112 anggota, Partai NU 91 anggota, PSII 16 anggota, Perti 7 anggota, dan partai-partai kecil lainnya dengan total berjumlah 230 anggota. Usul ketiga Sosial Ekonomi didukung oleh Partai Buruh 5 anggota dan Partai Murba 4 anggota, total berjumlah 9 orang.

Melihat kenyataan berpolitik seperti ini, Soekarno tidak hanya berpangku tangan sembari mengutuki keadaan. Sebagai orang yang mengklaim bahwa hanya dirinyalah yang sanggup memberikan keagungan kepada bangsa Indonesia. Soekarno bersikeras mencari solusi dari kemacetan politik yang ada. Melalui konsep Demokrasi Terpimpin ia

[12] Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah II*. (Bandung, PT Grafindo Salamadani 2010), 229-356.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencela Demokrasi Barat yang liberalistis yang menyebabkan tak mampu membentuk sebuah pemerintahan yang kuat yang dibutuhkan Indonesia 35 untuk membangun jalannya revolusi. Secara eksplisit Soekarno menyatakan: Demokrasi yang saya dambakan untuk Indonesia bukanlah demokrasi liberal seperti yang terdapat di Eropa Barat. Tidak! Apa yang saya inginkan untuk Indonesia adalah suatu demokrasi terpimpin, suatu demokrasi dengan pimpinan. Demokrasi terpimpin, demokrasi terpimpin, sesuatu yang dipimpin tetap demokrasi.

Pernyataan Presiden Soekarno itu mendapatkan kritik tajam dari Natsir, Ketua Umum Partai Masyumi, balas menanggapi : Selama demokrasi masih ada, selama itu pula partai-partai terus ada, dengan atau tidak dengan keputusan pemerintah. Selama masih ada kebebasan partai, selama itu pula demokrasi ditegakkan. Kalau demokrasi dikubur, demokrasi pun otomatis akan dikubur, dan di atas kuburan itu hanya diktator yang akan memerintah.[13]

Demokrasi Terpimpin menjadi titik awal digulirkannya Nasakom sebagai ideologi negara. Ideologi ini merupakan hasil sintesa dari pemikiran Soekarno yang mensinergikan antara Nasionalisme, Agamisme (dalam hal ini Islamisme sebagai kekuatan keagaamaan terbesar di Indonesia) dan Komunisme. Soekarno menilai ketiga ideologi tersebut mempunyai semangat perjuangan yang paralel yakni sama-sama anti-imprealisme kolonialisme Seperti yang dituturkan oleh Soekarno dalam

[13] Deliar Noer, *Gerakan Moderen*, 354.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

buku semi otobiografinya yang berjudul "*Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat*" , Soekarno mengungkapkan bahwa : NASAKOM adalah jiwa yang berisi ketiga kekuatan di atas mana kami berdiri tegak: NAS adalah orang-orang nasionalis yang bukan komunis, A adalah agama yang anti-komunis dan KOM orang yang beraliran komunis .

Nasakom yang digagas oleh Soekarno tidak luput dari serangan Partai Masyumi yang sedari dulu mengecam faham Komunisme karena tidak sesuai dengan falsafah Pancasila. Demi menciptakan "harmonisasi" di parlemen, pada tahun 1960 Presiden Soekarno mengeluarkan Penpres No.3/1960 yang isisnya membubarkan parlemen hasil Pemilu 1 955 yang dianggap tidak sesuai dengan jiwa dan semangat UUD 1945, Demokrasi Terpimpin dan Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959 (Lihat lampiran 3) Sebagai gantinya dibentuklah parlemen DPR GR dengan mengangkat 283 anggota, didalamnya tidak terdapat keterwakilan Partai Masyumi dan PSI. Di tahun sebelumnya wakil Partai Masyumi pun tidak didudukkan dalam Dewan Pertimbangan Agung (Harian Suara Merdeka edisi 31 Juli 1959) . Komposisi DPR GR seperti ini konon hasil persetujuan antara Soekarno dengan Ali Sastroamidjojo, Idham Chalid dan DN Aidit.

Kesepakatan antara Soekarno dengan tiga tokoh ini mencerminkan sudah terbentuknya komposisi kekuatan Nasakom yakni Ali Sastroamidjojo sebagai pimpinan PNI mewakili ideologi Nasionalisme, Idham Chalid sebagai pimpinan Partai NU mewakili ideologi Agamisme

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan DN Aidit sebagai pimpinan PKI mewakili ideologi Komunisme. Tidak cukup disingkirkan dari parlemen, tepat pada tanggal peringatan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1960 Presiden Soekarno mengeluarkan Keppres No. 200/1960 yang isinya pemerintah membubarkan Partai Masyumi. Sementara itu para tokoh partainya, baik itu yang terlibat peristiwa PRRI-Permesta maupun yang tidak, di kemudian hari mereka ditahan sebagai tahanan politik, antara lain Mohammad Natsir, Sjarifuddin Prawiranegara, Mohammad Roem, Prawoto Mangkusasmito, Isa Anshary, Yunan Nasution, Muchtar Ghazali dan EZ Muttaqien.

Pembubaran Partai Masyumi menimbulkan polemik pertanyaan besar, hal apa yang menyebabkan Presiden Soekarno begitu murka kepada Partai Masyumi. Seandainya jawabannya karena Partai Masyumi dianggap secara keseluruhan terlibat dalam PRRI-Permesta yang dicap oleh pemerintah sebagai pemberontak, terus kenapa sanksi serupa tidak ditimpakan terhadap PKI yang juga pernah terlibat pada pemberontakan Peristiwa Madiun 1948, apa motif dari sikap Soekarno berani membubarkan partai pemenang kedua Pemilu 1955 ini . Adakah hasutan dari PKI, yang notabene musuh besar Partai Masyumi, untuk merubah pandangan politik Soekarno terhadap Partai Masyumi, sebab masa Demokrasi Terpimpin adalah masa mesra kedekatan Soekarno dengan PKI dan blok komunisme umumnya. Berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan penelitian terhadap konflik politik yang melibatkan antara Soekarno dengan Partai Masyumi pada era Demokrasi Terpimpin.

D. Peran M.Natsir dalam PRRI

Pada awal tahun 1958, PRRI berdiri akibat ketidakpuasan terhadap pemerintah karena ketimpangan-ketimpangan sosial yang terjadi dan pengaruh komunis (terutama PKI) yang semakin menguat. Alasan pembentukannya antara lain ialah, tokoh-tokoh PRRI berpendapat bahwa pemerintah RI di bawah pimpinan Perdana Menteri Djuanda adalah pemerintah yang tidak sah karena dibentuk oleh Presiden Soekarno dengan cara-cara yang menyimpang dari aturan-aturan konstitusi yang berlaku. Para tokoh PRRI kemudian mengangkat Syafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri PRRI dan kemudian membentuk Kabinet tandingan sebagai Jawaban atas dibentuknya kabinet Ir Juanda di Jawa. Kabinet PRRI berbasis di Sumatera Tengah. PRRI masih tetap mengakui Soekarno sebagai Presiden PRRI, karena ia diangkat secara konstitusional.[14]

Mereka pun menuduh bahwa pemerintah pusat RI terlalu toleran kepada golongan komunis. Pada periode ini Soekarno paling tidak telah mengarahkan sistem pemerintahan kearah yang cukup otoriter walaupun penegasan mengenai keotoriteran ini baru terjadi ketika tahun 1960 saat Soekarno membubarkan DPR hasil Pemilu tahun 1955. Disamping itu Soekarno mulai mencari penguatan atas segala tindakan yang dilakukannya dengan cara memainkan kakinya diantara dua kekuatan yang sejaklama

[14] Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional (1945-1965)*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, Cet. ke-1, 1987), 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berseteru yaitu Militer Angkatan Darat dan PKI. Bukan tanpa alasan kemudian Soekarno condong ke PKI, karena PKI dianggap salah satu partai yang paling sempurna dengan kekuatan masa yang sangat termobilisasi mulai dari tingkat atas hingga tingkat terbawah.

Pihak PKI juga banyak melakukan proteksi terhadap Soekarno kritikan-kritikan yang muncul dari para petinggi Masyumi banyak dimentahkan kembali melalui surat-surat kabar terbitan PKI seperti Harian Rakyat. Harian Rakyat sering memberitakan tentang kejelekan-kejelekan pihak oposisi serta membuat tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Surat kabar milik PKI ini memberitakan mengenai usaha pembunuhan Soekarno di Cikini. Harian Rakyat menyatakan bahwa otak dari aksi teror tersebut adalah Natsir, Safrudin Prawiranegara ataupun Burhanudin Harahap, pemberitaan ini menyebabkan aksi teror yang di lakukan oleh pemuda PKI terhadap Natsir dan Syafrudin, keduanya sudah mengadukan teror tersebut kepada Polisi dan Kejaksaan tetapi tidak mendapat tanggapan sampai akhirnya mereka meninggalkan Jakarta demi keamaanan karena kondisi politik yang tidak menentu tersebut.

Menuru Akmal Jacob kepergian Natsir dari Jakarta ke kota Padang pada awalnya bukan untuk bergabung dengan Dewan Perjuangan tetapi karena alasan keamanan kareana waktu Natsir sering mendapat intimidasi.[15]

Pada Januari 1958 terjadi pertempuran di Sungai Dahe sebuah kota kecil di perbatasan Sumatera Barat dan Jambi disana para perwira pemberontak Daerah melakukan pertemuan dengan beberapa tokoh sipil seperti Natsir,

[15] Akma Jacob, *Wawancara* (Bukit Tinggi 06-08-2015) .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syafruddin Prawiranegara, Burhanuddin Harahap dan Sumitro Djojohadikusumo. Pertemuan ini bertujuan untuk memperingatkan Pemerintah Pusat untuk memetuhi konstitusi.[16]

Keterlibatan tokoh sipil seperti Natsir dan Syafruddin dalam PRRI menurut Sumitro hanya sebagai *second role* peranan pertama di pegang oleh Dahlan Djambek. Pernyatan Djambek menjadi bukti bahwa Natsir di PRRI tidak mempunyai peran yang peting, bukti kedua adalah di kabinet PRRI tidak tercantum nama Muhammad Natsir. Ia hanya hadir pada pertemuan di Sungai Daereh.[17]

Namun peran Natsir menjadi sangat nyata ketika Amerika mendekati PRRI untuk memberikan bantuan, Natsir waktu itu menolak dengan tegas intervensi Amerika dengan beralasan bahwa hal itu akan memperburuk keadaan.[18]

Tahun 1959 posisi PRRI semakin terdesak oleh serangan bertubi-tubi yang di lakukan oleh tentara Republik melihat kondisi ini para pemimpin PRRI khususnya yang beragama Islam mempunyai inisiatif untuk menyatukan Daerah-daerah yang bergejolak dalam satu wadah perjuangan, atas inisiatif Natsir dan Syafruddin Prawiranegara kemudian membuat Konstitusi Negara Serikat yang pada akhirnya meliputi selurah Negara Indonesia yang mereka sebut dengan Republik Federal Indonesia atau Republik Persatuan Indonesia

---

[16] Dzulfikriddin, *Mohammad Natsir Dalam Sejarah Politik Indonesia:Peran dan Jasa Natsir dalam Dua Orde Indonesia*,(Mizan Pustaka: Bandung, 2010),98

[17]Tim Penulis Republika. *Muhammad Natsir di Panggung Sejarah Republik.* (Jakarta, Republika, 2008), 110.

[18] Akma Jacob, *Wawancara* (Bukit Tinggi 06-08-2015) .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(RPI). Pembentukan PRI tidak lepas dari peran besar Muhammad Natsir. Natsir bersama Syafruddin Prawiranegara sebagai tokoh Islam dan Ulama' yang di segani di Indonesia menggalang dukungan ke daerah dengan dengan menggandeng tokoh-tokoh Islam yang kontra dengan Republik seperti Daud Beureu'h, Kahar Muzakkar dan Sukarmadji Maridjan Kartosuwirjo.[19]

Dalam pemerintahan PRRI/RPI M. Natsir memegang posisi kedua sebagai Wakil Perdana Menteri, sedang Perdana Menterinya adalah Mr.Syafruddin Prawiranegara. Menurut pengawal Natsir ketrlibatan Natsir dalam PRRI/RPI tidak hanya sebagai penggalang massa dan juru strategi saja tetapi Natsir juga berperan sebagai pembuat teks Proklamasi RPI. Dengan keterlibatan langsung Natsir dalam pemberontakan PRRI terjadi sebuah tragedi pada seorang Demokrat. Natsir adalah pejuang dengan kemampuan bebicara dengan otak yang cerdas dan rasional, seorang demokrat menempuh jalan yang Inskonstitusional namun begitulah sejarah dengan segala tragedinya.

[19] Akma Jacob, *Wawancara* (Bukit Tinggi 06-08-2015) .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id